



Siswa-siswi sekolah dasar di Lombok Timur belajar mengenal bagian anggota tubuh melalui permainan edukatif.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Lombok Timur

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Lombok Timur: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Lombok Timur belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Dua faktor utama yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Lombok Timur meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender) di sekolah serta praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas. Selain itu, langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sistematis masih terbatas.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan efektif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan, serta (5) melaksanakan hasil dan rekomendasi Musrenbang.

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan, dari angka 0-100, skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebesar 50,88 dan 39,24 (Kemendikbud, 2024). Kedua skor itu lebih rendah sekitar dua poin dari nilai rata-rata provinsi.

Hasil Asesmen Nasional juga menunjukkan kesenjangan antara skor literasi dan numerasi murid laki-laki dan perempuan (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 44,41; perempuan 48,51

Numerasi : Laki-laki 33,68; perempuan 35,51

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 1-2 poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Lombok Timur, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Lombok Timur pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 3-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Hal ini disebabkan pemahaman pemangku kepentingan belum sepenuhnya sama tentang definisi dan cakupan kekerasan, sehingga murid turut belum bisa membedakan tindakan yang benar dan salah. Keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah pun belum berfungsi secara penuh.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 3.115 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 32% tidak sekolah dan 68% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusif (27%), sekolah inklusif (17%), atau sekolah luar biasa/SLB (24%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, murid penyandang disabilitas masih sering ditolak ketika mendaftar ke sekolah. Akses ke dan di sekolah tidak memadai serta guru dan tenaga pendukung dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia.

Stigma sosial dan stereotip tentang disabilitas masih sangat kuat di masyarakat. Beberapa murid penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri dan rentan mengalami perundungan, sehingga tidak mau belajar di sekolah. Atau, orang tua menyembunyikan mereka karena malu, yang membuat mereka tidak bisa sekolah. Padahal, murid penyandang disabilitas memiliki keinginan besar untuk bersekolah. Kehadiran mereka pun dapat meningkatkan kesadaran dan kedulian sosial guru dan murid lain.

Di sisi lain, masih banyak pula murid yang termarginalkan. Contohnya, murid yang berasal dari keluarga miskin dan kelompok masyarakat adat, murid yang tinggal di daerah terpencil, murid yang belum bisa berbahasa Indonesia, murid yang terlibat dalam perkawinan anak, serta murid dengan orang tua merantau (pekerja migran) atau berpisah.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Lombok Timur mencapai 118,94 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Nusa Tenggara Barat (115,31), tetapi di bawah indeks Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, tanah longsor berisiko tinggi di kabupaten ini.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Perubahan iklim di daerah terpencil

Ketimpangan akses dan fasilitas bagi anak-anak di daerah terpencil (seperti pedesaan, kawasan pesisir, dan lereng gunung) membuat mereka lebih rentan terhadap capaian belajar rendah dan dampak bencana akibat perubahan iklim.



Kemiskinan dan gender

Kemiskinan merupakan penyebab utama murid putus sekolah. Murid laki-laki harus bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara murid perempuan seringkali dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.



Risiko daerah terpencil

Murid penyandang disabilitas dari keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses sangat minim terhadap berbagai layanan yang dapat membantu pendidikan mereka.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan agar semakin responsif dan efektif

1. Memperluas sosialisasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
2. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi pendidikan karakter dalam kurikulum, mengoptimalkan penerapan program pencegahan kekerasan (seperti Sekolah Ramah Anak dan Gerakan Sekolah Sehat), serta memperkuat sistem pelaporan kasus kekerasan.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui dashboard Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan, pemberian dukungan, dan penguatan kapasitas guru untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
2. Mengupayakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
3. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan serta menjamin pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas.



Para siswi melakukan eksplorasi praktik sains sederhana di dalam kelas.
(©Tim Komunikasi INOVASI)



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan di daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Pendidikan: Melaksanakan hasil dan rekomendasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pendidikan untuk mendukung penerapan rekomendasi kebijakan ini, juga meningkatkan capaian literasi dan numerasi, pendidikan karakter, serta pendidikan inklusif



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Memastikan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) berjalan optimal. Peraturan tersebut dapat diaplikasikan dengan mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum dan melakukan simulasi evakuasi bencana di sekolah.
2. Mendukung pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
3. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merancang skema evakuasi bencana di sekolah. Dengan begitu, murid dan guru memiliki kesiapsiagaan, mampu merespons bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
4. Memperluas sosialisasi dampak perubahan iklim serta kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan, terutama secara langsung ke masyarakat di daerah terpencil. Langkah ini bertujuan memberikan mereka akses informasi dan membangun kesadaran yang sama.